

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Berpikir	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	28
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	28
1. Perlindungan Konsumen	28
2. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	29
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	33
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen	34
5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	40
6. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen	49
7. Lembaga Perlindungan Konsumen	51
8. Penyelesaian Sengketa Konsumen	61
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	66
C. Hukum Pengangkutan Laut Di Indonesia	70
1. Pengangkutan Laut	70
2. Asas-Asas Pengangkutan Laut	72

3. Tujuan Pengangkutan Laut	76
4. Pihak-Pihak Pengangkutan Laut	78
5. Hak Dan Kewajiban Pengangkutan Laut	79
6. Jenis Kerusakan Pada Pengangkutan Laut.....	86
7. Tanggung Jawab Pengangkutan Laut	88
D. Kedudukan Penumpang Sebagai Konsumen Jasa Transportasi.....	91
E. Penelitian Terdahulu	93
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	107
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian	107
B. Jenis Dan Sumber Data	108
C. Teknik Pengumpulan Data.....	109
D. Teknik Analisis Data.....	111
E. Tempat Dan Waktu Penelitian	111
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI LAUT <i>SPEEDBOAT</i> ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PROVINSI RIAU	113
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	113
B. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Transportasi Laut <i>Speedboat</i> Antar Kota Antar Provinsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Riau.....	121
C. Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Transportasi Laut <i>Speedboat</i> Antar Kota Antar Provinsi.....	162
D. Konsep Penyelenggaraan Jasa Transportasi Laut <i>Speedboat</i> Antar Kota Antar Provinsi Yang Dapat Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	192
E. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penumpang Apabila Pelaku Usaha Transportasi Laut <i>Speedboat</i> Antar Kota Antar Provinsi Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	205

BAB V PENUTUP	237
A. Simpulan	237
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	241
LAMPIRAN.....	261

